

Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan: Sinergi Ilmu Ekonomi, Lingkungan, dan Kebijakan Publik**Oming Ratna Wijaya¹**¹*Universitas Kyai Abdullah Faqih Gresik*¹*omingwijaya2002@gmail.com***Abstract**

Global climate change and unsustainable resource exploitation require a new development model. This study explores the green economy as an integrative approach linking economic growth, environmental protection, and public policy. Using a qualitative descriptive-analytical method based on literature review and document analysis from international journals, institutional reports, and national regulations, the study identifies key drivers of sustainable transition, including green investment, renewable energy, and consistent government policies. The synergy of economic, environmental, and policy dimensions enhances green economy implementation and supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). However, challenges such as cross-sectoral coordination, infrastructure readiness, and regulatory consistency remain in developing countries like Indonesia. The research underscores the need for a multidisciplinary approach, stakeholder collaboration, and integrated policy and investment strategies to create inclusive and environmentally sustainable development. Academically, it offers a conceptual framework and practical recommendations for policymakers and development practitioners.

Keywords: *green economy, sustainable development, public policy, green investment, renewable energy*

Abstract

Perubahan iklim global dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan menuntut model pembangunan baru. Penelitian ini mengkaji ekonomi hijau sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan

Correspondence authors:

Oming Ratna Wijaya, e-mail: omingwijaya2002@gmail.com

Article History

Received: 01 Agustus 2025 | Revised: 05 Agustus 2025 | Accepted: 25 Agustus 2025 | Available online: 01 September 2025

How to Cite this Article

Ratna Wijaya, Oming (2025). Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan: Sinergi Ilmu Ekonomi, Lingkungan, dan Kebijakan Publik. *Syamil: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(1), 35-46. doi: xxx



© 2025. The author(s). Syamil: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0)

kebijakan publik. Dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen dari jurnal internasional, laporan lembaga, dan regulasi nasional, penelitian ini mengidentifikasi faktor utama percepatan transisi berkelanjutan, seperti investasi hijau, energi terbarukan, dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Sinergi antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan kebijakan meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi hijau serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, tantangan seperti koordinasi lintas sektor, kesiapan infrastruktur, dan konsistensi regulasi masih ada di negara berkembang termasuk Indonesia. Penelitian ini menekankan pendekatan multidisipliner, kolaborasi pemangku kepentingan, serta integrasi kebijakan dan investasi untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi akademis berupa kerangka konseptual dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan.

Kata kunci: *green economy, pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik, investasi hijau, energi terbarukan*

Introduction

Perubahan iklim global dan penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali telah menciptakan krisis yang menuntut bentuk pembangunan baru. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem, konsep *green economy* muncul sebagai solusi sinergis antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seenaknya menjaga pertumbuhan tanpa memerhatikan keterbatasan planet sudah tidak relevan di era ini. Definisi *green economy* dari UNEP menggambarkan relevansi konsep tersebut: ekonomi yang memperbaiki kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi¹. Dengan demikian, urgensi sinergi ilmu ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik semakin mendesak demi mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

Konsep *green economy* juga sangat relevan dalam merespons tantangan global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan), SDG 13 (Tindakan Iklim), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Strategi pembangunan yang menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan menjadi sangat penting sebagai dasar pencapaian target-target internasional. Badan PBB seperti UNDESA, UNEP, dan World Bank secara aktif mendorong adopsi *green economy* untuk mendorong pertumbuhan inklusif, penciptaan lapangan kerja hijau, serta pengentasan kemiskinan tanpa merusak ekosistem bumi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai landasan konseptual sekaligus strategi literasi kebijakan untuk

¹ Van Paddenburg et Al., "Using Models for Green Economy Policymaking," *United Nations Environment Programme*, 2014.

memperkuat integrasi antar dimensi pembangunan dalam konteks Negara Berkembang seperti Indonesia.

Berbagai studi internasional telah mengurai hubungan antara ekonomi dan lingkungan. D'Amato et al. (2021) membuktikan bahwa pengembangan ekonomi hijau mampu sekaligus memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan ekologi secara terpadu². Wang et al. (2022) memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal hijau—investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau—mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berkat inovasi teknologi ramah lingkungan³. Tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan teknologi, pendanaan, serta resistansi sektor tradisional, juga telah diungkap dalam literatur kebijakan nasional kontemporer⁴. Selain itu, agen ekonomi adaptif dan kerangka analitik kompleks juga disebut penting dalam mendesain transisi berkelanjutan yang lebih realistis⁵. Bersama-sama, kajian ini memperkaya pemahaman multidisipliner terhadap ekonomi hijau.

Meski demikian, sebagian besar studi masih bersifat parsial—fokus pada aspek ekonomi saja atau kebijakan saja, tanpa menyatukan semua dimensi secara holistik. Misalnya, ada kajian ekonomi hijau secara mikro tanpa analisis kebijakan publik mendalam, begitu pula riset kebijakan tanpa merujuk pada transformasi ekonomi hijau secara nyata di lapangan. Model seperti *Policy Coherence for Development* dari OECD menegaskan perlunya integrasi antara ekonomi, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, namun implementasi strateginya belum banyak diteliti secara lokal. Penelitian ini hadir untuk menjawab gap itu melalui pendekatan integratif, yang mengkaji sinergi lintas-disiplin dalam konteks nasional, yakni Indonesia. Fokus ini membawa kontribusi baru untuk menggabungkan ilmu ekonomi, kebijakan, dan pelestarian lingkungan dalam satu kerangka konseptual.

Penelitian ini bertujuan menyajikan analisis integratif antara ilmu ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebijakan publik dalam kerangka *green economy* sebagai model pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya mencakup: (1) mengidentifikasi mekanisme sinergis antara pertumbuhan ekonomi dan investasi hijau; (2) mengevaluasi peran inovasi kebijakan publik dalam menciptakan kondisi yang mendukung transformasi ekonomi; serta (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kebijakan. Dengan pendekatan ini, studi

² Al.

³ Xinxi Wang et al., “Interplay among institutional actors for sustainable economic development—Role of green policies, ecopreneurship, and green technological innovation,” *Frontiers in Environmental Science* 10, no. September (2022): 1–8, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.956824>.

⁴ Wang et al.

⁵ Jean Francois Mercure et al., “Modelling complex systems of heterogeneous agents to better design sustainability transitions policy,” *Global Environmental Change* 37, no. 0 (2016): 102–15, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.003>.

tidak hanya sekedar teoritis, tetapi juga membawa nilai operasional untuk praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang model pembangunan yang inklusif dan ekologis.

Kontribusi penelitian ini bersifat akademik dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur *green economy* dengan menyodorkan kerangka multidisipliner yang menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik secara simultan. Praktisnya, hasil penelitian diharapkan membantu pembuat kebijakan, akademisi, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang kontekstual untuk Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta model pembangunan yang selaras dengan SDGs, sekaligus berkelanjutan serta mampu menciptakan lapangan kerja hijau dan pelestarian lingkungan secara nyata.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis karena tujuan utamanya adalah memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini memungkinkan peneliti menafsirkan keterkaitan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik dalam kerangka *green economy*. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menganalisis makna di balik hubungan antarvariabel. Pilihan ini relevan untuk menjawab kompleksitas pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan analisis multi-aspek ⁶.

Sumber data penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi jurnal internasional, laporan lembaga dunia seperti UNEP, World Bank, dan UNDP. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan pembangunan nasional, serta regulasi terkait kebijakan ekonomi hijau. Kombinasi dua jenis data ini membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika global dan lokal dalam isu *green economy*, sehingga dapat memperkaya analisis dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. *Library research* memungkinkan peneliti menggali teori, konsep, serta temuan empiris dari berbagai publikasi akademik, sementara analisis dokumen difokuskan pada regulasi, laporan kebijakan, dan data pembangunan. Pendekatan ini efektif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana *green economy* dipraktikkan dalam berbagai konteks. Teknik

⁶ John W Creswell dan Cheryl N Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Sage publications, 2016).

ini juga sering digunakan untuk kajian kebijakan publik karena mampu menyoroti perspektif historis dan kontemporer ⁷

Data dianalisis menggunakan content analysis dengan tahapan kategorisasi isu ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Analisis isi dipilih karena mampu mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antar konsep dalam dokumen. Proses ini membantu menyoroti titik penting dari setiap aspek dan menghubungkannya secara sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghindari bias subjektif sekaligus menghasilkan interpretasi yang konsisten. Analisis isi banyak dipakai dalam penelitian kebijakan karena mampu menjembatani data kualitatif yang beragam menjadi kesimpulan yang terstruktur ⁸.

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi titik sinergi atau overlap antara ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Sinergi tersebut menjadi dasar analisis relevansi green economy terhadap praktik pembangunan berkelanjutan. Dengan mengungkap area persinggungan, penelitian ini berusaha menunjukkan strategi yang lebih integratif dan aplikatif dalam kebijakan pembangunan. Fokus ini penting karena kebijakan yang bersifat parsial sering gagal menjawab kompleksitas tantangan global. Identifikasi sinergi diyakini dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual bagi pembuat kebijakan ⁹.

Result and Discussion

Result

Investasi hijau atau *green investment* menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Data Bank Dunia mencatat bahwa alokasi dana untuk energi bersih dan teknologi ramah lingkungan mengalami peningkatan rata-rata 10% per tahun di negara berkembang, yang berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja hijau (*green jobs*) serta peningkatan kualitas lingkungan. Green investment bukan hanya mendukung sektor energi, tetapi juga berpengaruh pada pertanian berkelanjutan, transportasi rendah emisi, dan pengelolaan limbah. Hal ini membuktikan bahwa investasi ramah lingkungan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi tanpa merusak ekosistem. Secara praktis, kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak terhadap energi terbarukan memperkuat peran green investment di berbagai negara. Tren ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dapat tetap tumbuh dengan menjaga keseimbangan ekologi¹⁰.

⁷ Phillip W Bowen, Richard Rose, dan Andrew Pilkington, "Mixed methods-theory and practice. Sequential, explanatory approach," *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods* 5, no. 2 (2017): 10.

⁸ Klaus Krippendorff, *Content analysis: An introduction to its methodology* (Sage publications, 2018).

⁹ Dalia D'Amato et al., "Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues," *Journal of cleaner production* 168 (2017): 716–34.

¹⁰ Rita Parmawati, *Ecology, Economy, Equity: sebuah upaya penyeimbangan ekologi dan ekonomi* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

Energi terbarukan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan green economy karena memberikan solusi nyata terhadap krisis energi fosil. Data IRENA (2022) menunjukkan bahwa kapasitas energi terbarukan global tumbuh hingga 9,6% pada tahun 2021, dengan energi surya dan angin sebagai kontributor terbesar. Peningkatan ini membuktikan bahwa transisi energi sedang berlangsung, meski masih menghadapi kendala di sektor infrastruktur dan kebijakan ¹¹. Negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang menjadi contoh implementasi serius melalui program *feed-in tariff* yang mendorong masyarakat berinvestasi pada energi terbarukan. Sementara itu, negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan subsidi untuk meningkatkan akses energi bersih bagi masyarakat. Data ini memperlihatkan bahwa adopsi energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan¹².

Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat implementasi green economy melalui regulasi, insentif, dan program pembangunan. Laporan UNDP (2020) menunjukkan bahwa banyak negara yang sudah mengintegrasikan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan nasional. Misalnya, Indonesia melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, yang diperkuat dengan kebijakan harga listrik ramah lingkungan¹³. Dukungan kebijakan ini menjadi pondasi bagi investor untuk masuk ke sektor hijau. Namun, efektivitas kebijakan sering dipengaruhi oleh birokrasi, koordinasi antar lembaga, dan tingkat kepatuhan industri. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga fasilitator dan katalisator transformasi menuju ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan praktik terbaik global di mana kebijakan publik terbukti mempercepat perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

Emisi karbon menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi green economy. Data Climate Watch (2021) menunjukkan bahwa negara maju masih mendominasi kontribusi emisi global, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, meski mereka juga berinvestasi besar dalam teknologi rendah karbon ¹⁴. Sementara itu, negara berkembang menghadapi tantangan karena kebutuhan industrialisasi sering berbenturan dengan target pengurangan emisi. Perbandingan ini memperlihatkan adanya ketimpangan global dalam pembagian tanggung jawab iklim. Tren terbaru menunjukkan adanya perbaikan, misalnya Uni Eropa berhasil menurunkan emisi sebesar 24% antara 1990–2019, sementara Tiongkok mulai

¹¹ G Webster Ross, "Injustice Within Renewable Energy Life Cycles: Can IRENA Offer a Solution?," *IdeaFest: Interdisciplinary Journal of Creative Works and Research from Cal Poly Humboldt* 6, no. 1 (2022): 8.

¹² Ross.

¹³ Sinta Herindrasti, Bonita Angelina, dan Priscillia Putriwinata, "Pengembangan Kebijakan Energi Terbarukan Di Indonesia, Vietnam, Dan Laos," *Sospol* 10, no. 2 (2024): 154–72.

¹⁴ Mengpin Ge dan Johannes Friedrich, "Climate Watch country greenhouse gas emissions data and methodology," 2024.

menunjukkan penurunan intensitas emisi per unit PDB. Data ini menegaskan bahwa pengendalian emisi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi dan teknologi, sehingga transisi menuju green economy harus dilakukan secara kolaboratif lintas negara¹⁵.

Discussion

Hasil yang diperoleh dari kontribusi investasi hijau, energi terbarukan, kebijakan pemerintah, dan tren emisi karbon memperlihatkan bahwa green economy bukan hanya konsep teoritis, tetapi sudah menjadi praktik nyata yang berdampak luas. Peningkatan green investment dan energi terbarukan membuktikan bahwa ada hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, laporan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa regulasi menjadi instrumen penting yang memperkuat proses transisi ini. Tren emisi karbon mengingatkan kita bahwa meskipun sudah ada kemajuan, tantangan global masih besar. Dengan demikian, data ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan green economy ditentukan oleh sinergi antara investasi, teknologi, dan kebijakan publik¹⁶.

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian D'Amato et al. (2017) yang menyatakan bahwa green economy berperan sebagai jembatan antara ekonomi dan ekologi. Kesamaan terlihat pada pentingnya investasi hijau dan energi terbarukan sebagai faktor kunci pembangunan berkelanjutan. Namun, perbedaan muncul dalam konteks kebijakan, di mana beberapa negara berkembang masih menghadapi hambatan regulasi yang memperlambat implementasi. Temuan baru dari penelitian ini adalah adanya pergeseran tren emisi karbon yang mulai menurun di negara industri besar, yang sebelumnya sulit dicapai. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya literatur dengan memberikan gambaran terkini mengenai dinamika implementasi green economy di level global¹⁷.

Peran kebijakan publik terbukti menjadi faktor dominan dalam mempercepat atau menghambat green economy. Data dari laporan pemerintah memperlihatkan bahwa regulasi yang konsisten, transparan, dan berbasis insentif mampu menarik investasi hijau dalam jumlah besar. Sebaliknya, birokrasi yang kompleks dan kebijakan yang tumpang tindih sering menjadi penghalang. Dalam konteks ini, kebijakan publik harus dirancang untuk mendorong partisipasi sektor swasta, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat riset serta inovasi teknologi ramah lingkungan. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang efektif, green

¹⁵ Ge dan Friedrich.

¹⁶ Loso Judijanto et al., *Green Economy* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

¹⁷ D D'Amato dan J Korhonen, "Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework," *Ecological Economics* 188 (2021): 107143, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143>.

economy hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu dipandang sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan¹⁸.

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan integratif antara aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik merupakan strategi yang paling relevan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan kebijakan publik sebagai pengatur arah. Ekonomi menyediakan instrumen investasi, lingkungan menjadi tujuan perlindungan, dan kebijakan publik berperan sebagai jembatan penghubung. Tanpa integrasi multidisipliner, green economy akan berjalan parsial dan sulit memberikan dampak nyata. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Barbier (2011) yang menekankan bahwa green economy hanya dapat berhasil jika dilihat sebagai sistem multidimensi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dibangun atas dasar kolaborasi lintas disiplin dan sektor¹⁹.

Selain kontribusi green investment dan energi terbarukan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam kebijakan nasional terkait transisi energi dan pengelolaan emisi karbon. Data dari laporan *UNEP Emissions Gap Report* menegaskan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan target penurunan emisi²⁰. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* telah menargetkan net zero emission pada 2060. Namun, kesenjangan implementasi kebijakan masih terlihat, khususnya pada aspek koordinasi lintas sektor dan kesiapan infrastruktur pendukung. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik harus terus diperkuat agar investasi hijau tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu membentuk fondasi ekonomi hijau yang kokoh dan berkelanjutan.

Analisis lebih jauh menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan elemen penentu keberhasilan green economy, karena kebijakan berperan mengatur arah investasi, mengendalikan eksploitasi sumber daya, dan menetapkan regulasi lingkungan. Studi oleh Barbier menyebutkan bahwa keberhasilan transisi hijau di banyak negara sangat ditentukan oleh *policy coherence* yang mampu mengintegrasikan sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial²¹. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi regulasi, terutama terkait subsidi energi fosil yang kontradiktif dengan agenda dekarbonisasi. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan lintas sektor mempercepat transisi hijau. Oleh karena itu, integrasi

¹⁸ Jacqueline Madeleine Borel-Saladin dan Ivan Nicholas Turok, "The green economy: incremental change or transformation?," *Environmental Policy and Governance* 23, no. 4 (2013): 209–20.

¹⁹ Edward B Barbier, *Capitalizing on nature: ecosystems as natural assets* (Cambridge University Press, 2011).

²⁰ UNEP, "Emissions gap report 2022," n.d.

²¹ Barbier, *Capitalizing on nature: ecosystems as natural assets*.

antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik harus menjadi strategi utama. Jika kebijakan dapat diarahkan secara konsisten, maka sinergi green economy akan semakin kuat dalam mendukung pencapaian SDGs.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan berbasis green economy hanya dapat berhasil apabila terdapat sinergi yang kuat antara investasi hijau, teknologi energi terbarukan, serta kebijakan publik yang konsisten. Data empiris menunjukkan bahwa green investment mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi, namun tanpa dukungan regulasi yang jelas dan stabil, manfaat tersebut tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi penting. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Sachs et al. (2019) yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor untuk mencapai SDGs²². Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa strategi transisi menuju green economy harus dilihat bukan hanya sebagai agenda ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan strategis nasional yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan inovasi lintas sektor.

Peran kebijakan publik dalam mendukung green economy sangat krusial. Data menunjukkan bahwa negara dengan regulasi konsisten, insentif fiskal, dan dukungan riset mampu mempercepat transisi energi bersih. Misalnya, studi oleh Sovacool (2021), menunjukkan bahwa kebijakan publik yang pro-lingkungan dapat meningkatkan investasi energi terbarukan hingga 20% lebih cepat dibanding negara tanpa dukungan regulasi kuat²³. Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan justru menghambat transisi dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki posisi sentral dalam mengorkestrasi keberhasilan ekonomi hijau melalui kebijakan jangka panjang yang jelas, konsisten, dan kolaboratif.

Integrasi multidisipliner antara ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan sektor swasta untuk menyusun strategi komprehensif. Menurut Barbier (2020), keberhasilan transisi menuju green economy memerlukan kombinasi antara insentif ekonomi, perlindungan lingkungan, dan regulasi yang tegas²⁴. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa setiap aspek saling bergantung dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, integrasi multidisipliner harus dipahami sebagai fondasi untuk menciptakan strategi pembangunan hijau yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

²² Jeffrey D Sachs et al., "Six transformations to achieve the sustainable development goals," *Nature sustainability* 2, no. 9 (2019): 805–14.

²³ Kirsten E H Jenkins et al., "The methodologies, geographies, and technologies of energy justice: a systematic and comprehensive review," *Environmental Research Letters* 16, no. 4 (2021): 43009.

²⁴ Edward B Barbier, "Greening the post-pandemic recovery in the G20," *Environmental and Resource Economics* 76, no. 4 (2020): 685–703.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan berbasis green economy hanya dapat berhasil apabila terdapat sinergi yang kuat antara investasi hijau, teknologi energi terbarukan, serta kebijakan publik yang konsisten. Data empiris menunjukkan bahwa green investment mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi, namun tanpa dukungan regulasi yang jelas dan stabil, manfaat tersebut tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi penting. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Sachs et al. (2019) yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor untuk mencapai SDGs²⁵. Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa strategi transisi menuju green economy harus dilihat bukan hanya sebagai agenda ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan strategis nasional yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan inovasi lintas sektor.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa green economy mampu menjadi jembatan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan serta efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini bukan hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Dengan demikian, green economy berpotensi menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan global, terutama dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang menuntut integrasi multidimensi.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual yang integratif dalam menghubungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi pembangunan dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berbasis literatur dan analisis kebijakan, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan kondisi empiris di lapangan yang bisa memberikan gambaran lebih komprehensif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya riset lanjutan berbasis empiris pada level lokal agar sinergi green economy dapat diuji dalam konteks nyata. Selain itu, kolaborasi lintas pemangku kepentingan harus diperkuat, termasuk akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Pengembangan kebijakan berbasis data serta integrasi hasil penelitian dalam kurikulum pendidikan ekonomi lingkungan juga menjadi langkah penting. Implikasi dari temuan ini adalah tersedianya dasar kebijakan yang lebih kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan.

²⁵ Sachs et al., "Six transformations to achieve the sustainable development goals."

References

- Al., Van Paddenburg et. "Using Models for Green Economy Policymaking." *United Nations Environment Programme*, 2014.
- Barbier, Edward B. *Capitalizing on nature: ecosystems as natural assets*. Cambridge University Press, 2011.
- . "Greening the post-pandemic recovery in the G20." *Environmental and Resource Economics* 76, no. 4 (2020): 685–703.
- Borel-Saladin, Jacqueline Madeleine, dan Ivan Nicholas Turok. "The green economy: incremental change or transformation?" *Environmental Policy and Governance* 23, no. 4 (2013): 209–20.
- Bowen, Phillip W, Richard Rose, dan Andrew Pilkington. "Mixed methods-theory and practice. Sequential, explanatory approach." *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods* 5, no. 2 (2017): 10.
- Creswell, John W, dan Cheryl N Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.
- D'Amato, D, dan J Korhonen. "Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework." *Ecological Economics* 188 (2021): 107143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143>.
- D'Amato, Dalia, Nils Droste, Ben Allen, Marianne Kettunen, Katja L\"ah\"tinen, Jaana Korhonen, Pekka Leskinen, Brent D Matthies, dan Anne Toppinen. "Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues." *Journal of cleaner production* 168 (2017): 716–34.
- Ge, Mengpin, dan Johannes Friedrich. "Climate Watch country greenhouse gas emissions data and methodology," 2024.
- Herindrasti, Sinta, Bonita Angelina, dan Priscillia Putriwinata. "Pengembangan Kebijakan Energi Terbaru Di Indonesia, Vietnam, Dan Laos." *Sospol* 10, no. 2 (2024): 154–72.
- Jenkins, Kirsten E H, Benjamin K Sovacool, Niek Mouter, Nick Hacking, Mary-Kate Burns, dan Darren McCauley. "The methodologies, geographies, and technologies of energy justice: a systematic and comprehensive review." *Environmental Research Letters* 16, no. 4 (2021): 43009.
- Judijanto, Loso, Marius Masri, Fifian Permata Sari, Niken Lestari, Vina Islami, Eka Siskawati, dan Andi Primafira B Eka. *Green Economy*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Krippendorff, Klaus. *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications, 2018.
- Mercure, Jean Francois, Hector Pollitt, Andrea M. Bassi, Jorge E. Vi\u00f1uales, dan Neil R. Edwards. "Modelling complex systems of heterogeneous agents to better design sustainability transitions policy." *Global Environmental Change* 37, no. 0 (2016): 102–15. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.003>.
- Parmawati, Rita. *Ecology, Economy, Equity: sebuah upaya penyeimbangan ekologi dan ekonomi*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Ross, G Webster. "Injustice Within Renewable Energy Life Cycles: Can IRENA Offer a Solution?" *IdeaFest: Interdisciplinary Journal of Creative Works and Research from Cal Poly Humboldt*

6, no. 1 (2022): 8.

Sachs, Jeffrey D, Guido Schmidt-Traub, Mariana Mazzucato, Dirk Messner, Nebojsa Nakicenovic, dan Johan Rockström. “Six transformations to achieve the sustainable development goals.” *Nature sustainability* 2, no. 9 (2019): 805–14.

UNEP. “Emissions gap report 2022,” n.d.

Wang, Xinxin, Muhammad Umair Javaid, Sobia Bano, Hamna Younas, Amin Jan, dan Anas A. Salameh. “Interplay among institutional actors for sustainable economic development—Role of green policies, ecopreneuership, and green technological innovation.” *Frontiers in Environmental Science* 10, no. September (2022): 1–8.
<https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.956824>.